

**PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
EKSKARESIDENAN BANYUMAS**

(Tahun Periode 2006 Sampai 2010)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh :

Muchammad Zaky

B 200 070 111

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul :

**“PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
EKSRESIDENAN BANYUMAS (TAHUN PERIODE 2006-2010)”**

Yang ditulis oleh:

MUCHAMMAD ZAKY

B 200 070 111

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.

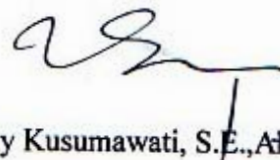
Surakarta, Oktokber 2012

Pembimbing



(Dra. Erma Setyowati. M.M., Ak.)

Co Pembimbing



(Eny Kusumawati, S.E., Ak.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE., AK., M.Si)

**PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
EKSKARESIDENAN BANYUMAS (TAHUN PERIODE 2006-2010)”**

MUCHAMMAD ZAKY

B 200 070 111

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA**

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui besar laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk menganalisis besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menganalisis besar efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan untuk menganalisis perbedaan laju pertumbuhan, kontribusi, dan efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh selama periode 2006-2010. Alat analisis yang digunakan antara lain tingkat laju pertumbuhan, kontribusi, efektifitas, dan analisis ANOVA.

Hasil penelitian menunjukkan, Rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas menunjukkan trend peningkatan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas mengalami fluktuasi peningkatan. Efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas rata-rata mencapai 100%, hal ini berarti Pemerintahan Daerah sudah cukup efektif dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Setelah dilakukan uji beda menggunakan Analisis ANOVA dapat disimpulkan sebagai berikut, Tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Terdapat perbedaan efektifitas penerimaan pajak namun tidak terdapat beda retribusi daerah pada Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas.

Keywords: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan, bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar dipelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro 2007:2). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila pemerintah terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “pencapaian target” (Widjaja 2005).

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan, retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu jasa umum dan jasa usaha.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, faktor kemampuan daerah merupakan hal yang penting, khususnya dalam era otonomi daerah. Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintahan daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Disini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (Susetyo, 2008: 39-53).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Waluya (2008) tentang “Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur”. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tingkat II di Propinsi Jawa Timur”. Dan skripsi yang diteliti oleh Ratna (2011) tentang “kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan belanja daerah (APBD) selama periode 2005-2009 (studi kasus Pemerintahan Kota Wonogiri)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi yaitu data dan populasi penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di eksKaresidenan Banyumas dan periode yang digunakan tahun 2006 sampai 2010. Alat analisis yang digunakan antara lain analisis *time series*, analisis *cross-section* dan analisis ANOVA.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul **“Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006-2010)”** .

B. Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi

Pajak Daerah

Menurut Abdul (2001) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Jenis pajak secara umum dikelompokkan menjadi tiga, dalam pembagian jenis pajak ini Abdul (2001) mengelompokkan jenis pajak-pajak sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu kewajiban membayar pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu kewajiban membayar pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak ini muncul apabila terjadi kegiatan, perbuatan yang mengakibatkan terutangnya pajak.
2. Menurut Sifatnya, pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan atau subjek pajaknya.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutnya, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota untuk membiayai pengeluaran daerahnya masing-masing.

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

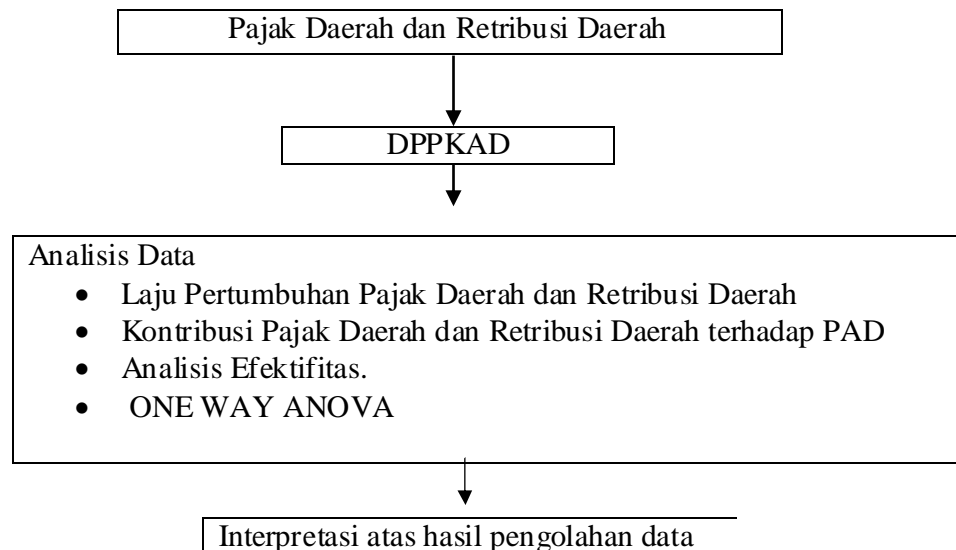
Menurut Abdul (2001), “retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku”.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

Hipotesis

- H0 :Ada perbedaan, besar laju pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- H1 :Tidak ada perbedaan, besar laju pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kerangka Pemikiran:



C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu usaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada kontribusi PAD dalam APBD pemerintah daerah, khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas sebagai pilihan studi kasus.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data yang diambil dari tahun 2006 hingga tahun 2010 untuk data nilai realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang terdapat di Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas.

Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

2. Wawancara

Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanyajawab secara langsung ke pihak yang berwenang.

Analisis Data

1. Analisis *Time Series*

Analisis time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang diatur. Analisis time series dalam penelitian ini, diperoleh dengan menghitung laju pertumbuhan Pajak Daerah dan retribusi daerah.

a. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abdul (2001) laju pertumbuhan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{\text{RPPDt} - \text{RPPD}(t-1)}{\text{RPPD}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan

RPPDt = realisasi penerimaan pajak daerah

RPPD(t-1) = realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya

2. Analisis *Cross-section*

Analisis Cross-section atau analisis perbandingan keuangan (analisa naik-turun) adalah metode dan teknik dalam analisis dengan cara

memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Dalam penelitian ini, analisis cross-section dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD.

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Menurut Abdul (2001), kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{RPD}}{\text{RPAD}} \times 100\%$$

RPD = Realisasi Pajak Daerah

RPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Karesidenan Banyumas. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas..

- b. Analisis Efektifitas

Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Devas, 1989 : 146)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{RPPDRD}}{\text{TPPDRD}} \times 100\%$$

RPPDRD= Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TPPDRD = Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan angka/persentase mendekati 100 % maka pajak daerah dan retribusi daerah semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

3. Analisis ANOVA

Analisis ragam atau *analysis of variance* (ANOVA) adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Secara aplikatif, ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata lebih dari dua sampel berbeda

secara signifikan atau tidak. Program komputer yang umumnya digunakan adalah SPSS.

Apabila keputusan uji adalah H_0 ditolak karena $p\text{-value} < 0,05$, maka terdapat perbedaan. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan tersebut digunakan *uji Tukey*. (Singgih, 2012:288)

D. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan, Rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2007 pertumbuhan pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 7,98%, pada tahun 2008 meningkat menjadi 13,21%, walaupun pada tahun 2009 turun menjadi 9,78% namun meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 9,85%. Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2007 pertumbuhan pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 4,40%, pada tahun 2008 meningkat menjadi 20,42%, pada tahun 2009 turun drastis menjadi -12,76% namun meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 4,24%.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 22,11%, Kabupaten Purbalingga sebesar 14,56%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,82%, dan Kabupaten Cilacap sebesar 37,64%. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 46,57%, Kabupaten Purbalingga sebesar 62,40%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 58,79% dan Kabupaten Cilacap sebesar 37,77%. Efektifitas pajak daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 114,28%. Kabupaten Purbalingga sebesar 101,64%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 108,97% dan Kabupaten Cilacap sebesar 113,08%. Efektifitas retribusi daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 108,68%, Kabupaten

Purbalingga sebesar 100,84%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 99,83%, dan Kabupaten Cilacap sebesar 107,77%.

Setelah dilakukan uji beda menggunakan Analisis ANOVA dapat disimpulkan sebagai berikut, Tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Tidak terdapat perbedaan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota di eksKaresidenan Banyumas menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2007 pertumbuhan pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 7,98%, pada tahun 2008 meningkat menjadi 13,21%, walaupun pada tahun 2009 turun menjadi 9,78% namun meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 9,85%.
 - b. Rata-rata pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten/Kota di eksKaresidenan Banyumas menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2007 pertumbuhan pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 4,40%, pada tahun 2008 meningkat menjadi 20,42%, pada tahun 2009 turun drastis menjadi -12,76% namun meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 4,24%.
2. Kontribusi pajak dan retribusi pajak terhadap PAD pada Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas

- a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 22,11%, Kabupaten Purbalingga sebesar 14,56%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,82%, dan Kabupaten Cilacap sebesar 37,64%.
 - b. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 46,57%, Kabupaten Purbalingga sebesar 62,40%., Kabupaten Banjarnegara sebesar 58,79% dan Kabupaten Cilacap sebesar 37,77%..
3. Efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - a. Efektifitas pajak daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 114,28%. Kabupaten Purbalingga sebesar 101,64%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 108,97% dan Kabupaten Cilacap sebesar 113,08%.
 - b. Efektifitas retribusi daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2006-2010 rata-rata adalah 108,68%, Kabupaten Purbalingga sebesar 100,84%, Kabupaten Banjarnegara sebesar 99,83%, dan Kabupaten Cilacap sebesar 107,77%.
4. Setelah dilakukan uji beda menggunakan Analisis ANOVA dapat disimpulkan sebagai berikut, Tidak terdapat perbedaan laju pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas. Terdapat perbedaan efektifitas penerimaan pajak namun tidak terdapat perbedaan retribusi daerah pada Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas

Saran

1. Hasil penelitian menunjukan pajak daerah memiliki tingkat kontribusi dan efektifitas yang cukup tinggi terhadap penerimaan asli daerah. Namun laju pertumbuhan pajak daerah terlihat masih fluktuatif. Kondisi ini hendaknya

menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menjaga dan meningkatkan efektifitas dan kontribusi pajak daerah dengan melakukan koordinasi dengan aparat terkait atau dengan meningkatkan keadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.

2. Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi peneliti yang akan datang khususnya yang ingin meneliti faktor-faktor yang turut mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah. Peneliti yang akan datang hendaknya meningkatkan obyek penelitian dan menambah variabel-variabel lain, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan diketahui variabel apa yang paling mempengaruhi pendapatan asli daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.2001.*Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Penerbit Bunga Rampai.
- Della Putri Rahdina. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bogor.Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian
- Devas, Nick.al.1989.(Peny.).*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Drs.Waluya Jati, MM. 2008.”*Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) DI JAWA TIMUR.*”
- Ferdinand Kerebungu. 2008.”*Pengembangan Industri Pariwisata Budaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Manado*”.Sumber :JurnalAplikasiManajemen, Volume 6,Nomor 1.
- Kuncoro, Haryo.2007.*Fenomena Flaypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*.Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1, Hal: 47-63.
- Mamduh, M.H., Abdul, H. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mohammad Riduansyah. 2003.”*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.*

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)".Sumber:MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL 7,NO.2

Ratna Dewi. 2011. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Selama Periode 2005-2009 di Kota Wonogiri* [skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Singgih Santoso. 2012. *Panduan Lengkap SPSS*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Susetyo, Didik. 2008. "Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan". Sumber: JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN, VOL. 6, NO. 1, HAL: 39-53.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Wahyuni, Priyo, H.A. 2009. "Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali)". Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.